

Dukungan Penanganan Dampak COVID-19

Agustus 2020

**01
PRIORITAS**
Dari persiapan
hingga respon

**02
GENDER**
Pemerintah desa
yang responsif
GESI

**03
SISTEM DATA**
Refleksi dari
integrasi data untuk
bantuan sosial

**04
CERITA**
Penyesuaian
APB Desa untuk
COVID-19

**05
SURVEI**
Temuan survei pada
kesiapan dan
respon desa

+ **06 KEGIATAN DAN PUBLIKASI**

01 PRIORITAS



Prioritas KOMPAK Terkait COVID-19

Dokumen Revisi Rencana Kerja Tahunan 2020 KOMPAK yang disesuaikan dengan dukungan untuk kegiatan penanganan COVID-19 dapat diakses di:

<https://kompak.or.id/id/article/revisi-rencana-kerja-tahunan-kompak-2020>

Tujuan kami adalah memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya, sistem, dan data yang siap untuk menghadapi COVID-19 secara efektif

Dukungan KOMPAK kepada pemerintah daerah telah bergeser dari fase kesiapan menjadi tanggap COVID-19. KOMPAK telah memberikan dukungan kepada pemerintah kabupaten dan desa untuk melakukan realokasi anggaran guna memperluas program perlindungan sosial - khususnya untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) - dan untuk mendanai kegiatan pencegahan dan mitigasi.

Fokus dukungan saat ini adalah untuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang COVID-19 serta pengawasan kegiatan tanggap COVID-19 oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini termasuk memperkuat pengumpulan dan verifikasi data desa, terutama terkait kelompok rentan yang paling terkena dampak COVID-19 dari sisi kesehatan maupun ekonomi.

Dukungan ini juga diberikan kepada pemerintah pusat dalam menyusun pedoman nasional yang lebih jelas bagi pemerintah daerah terkait pengelolaan dan pencairan Dana Desa, serta peran BPD dan

masyarakat dalam kegiatan tanggap COVID-19.

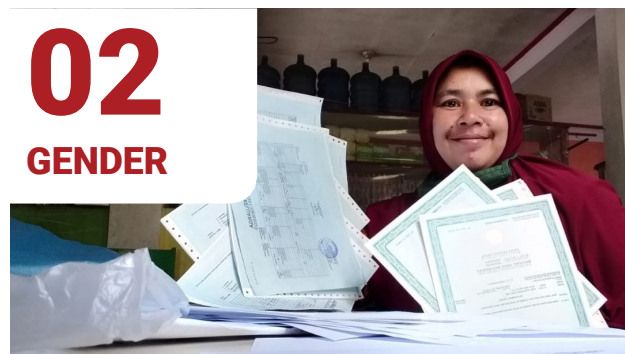
KOMPAK juga melakukan penelitian dan analisis yang membantu meningkatkan kualitas data dalam menghadapi COVID-19. Saat ini, kemitraan dengan Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan penyedia layanan selular dan perusahaan teknologi digital untuk menganalisis pola mobilitas dengan menggunakan data pengguna ponsel sedang dalam tahap perundingan. Selain itu, survei kepada lebih dari 6.000 rumah tangga oleh PEKKA juga telah selesai dilakukan. Survei tersebut menghadirkan informasi tentang distribusi program perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan. KOMPAK juga telah melakukan survei desa yang memberikan informasi yang bermanfaat untuk mendukung implementasi kegiatan KOMPAK ke depannya.

Pada bulan Juli, KOMPAK telah melakukan kegiatan *review* kinerja program dengan seluruh tim di tingkat provinsi dan nasional. Kegiatan ini mencatat bahwa KOMPAK menunjukkan kemajuan kinerja yang baik terkait dukungan tanggap COVID-19 yang diberikan dan menyoroti area yang memerlukan fokus lebih besar di masa mendatang.

Membantu pemerintah desa untuk lebih responsif terhadap perempuan dan kelompok rentan

Terus bertambahnya kasus COVID-19 menimbulkan peningkatan jumlah penduduk miskin dan memperparah tingkat kemiskinan. Kelompok perempuan dan kelompok rentan menjadi yang paling terdampak. Kondisi ini menciptakan permintaan yang lebih besar terhadap layanan pemerintah, tidak hanya di sektor kesehatan, tetapi juga untuk program perlindungan sosial dan layanan berbasis desa lainnya.

KOMPAK bekerja sama dengan mitra pemerintah untuk memperkuat suara serta peran perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam pengambilan keputusan di desa, dan juga dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. KOMPAK juga membantu memperkuat kapasitas pemerintah dalam mengimplementasikan layanan yang tanggap COVID-19, khususnya untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap tentang kelompok masyarakat yang paling terdampak, serta memperkuat peran Gugus Tugas COVID-19 Desa.



KOMPAK membantu gugus tugas tersebut dalam mengoordinasikan respon dan memastikan bantuan sosial mencapai masyarakat yang paling rentan. Hal ini termasuk meningkatkan kualitas pendataan dan distribusi BLT-Dana Desa yang tepat sasaran. KOMPAK mendukung hal ini lewat pengumpulan dan analisis data (menggunakan sistem informasi desa dan data kependudukan), serta penyusunan dan sosialisasi pedoman tentang alokasi anggaran, pendataan dan administrasi terkait BLT-Dana Desa.

Mengembangkan sistem data terintegrasi untuk Indonesia

Oleh: Didik Purwondanu, Public Financial Management Coordinator, Provinsi Jawa Timur (KOMPAK)

Data memang merupakan minyak baru. Di Indonesia, semakin banyak perusahaan milik negara (BUMN) dan *unicorn* swasta yang menggunakan *big data*. Misalnya, Telkomsel dan Gojek yang menggunakan analisis pola pergerakan masyarakat untuk pengambilan keputusan dan untuk mendominasi pasar.

Sayangnya, penggunaan data di sektor publik di Indonesia masih lambat. Selama beberapa minggu terakhir, Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan beberapa menteri telah menekankan pentingnya akurasi data sehingga dana yang dialokasikan untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 tepat sasaran.

Setidaknya ada tiga transfer tunai yang dapat dikutip, yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Kartu Prakerja. Sementara sebelum pandemi terjadi, pemerintah telah menerapkan upaya pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako Pangan (BSP).

Tantangan utama terkait distribusi bantuan sosial tidak hanya tentang ketepatan sasaran, tetapi juga bagaimana menghindari tumpang tindih. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, misalnya, menemukan 1.500 keluarga yang menerima transfer ganda.

Penyebab langsung dari ketidaktepatan alokasi ini adalah karena Indonesia tidak memiliki sumber data

penerima manfaat yang komprehensif. Kementerian Sosial telah membangun basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetapi masih perlu diintegrasikan dengan data dari program bantuan sosial lainnya.

Data kependudukan (NIK) masih belum sepenuhnya dapat dipadankan dengan DTKS. Selain itu, sinkronisasi data dapat lebih mudah dilakukan ketika menggunakan NIK sebagai kode unik. Ketika Pemerintah Kabupaten Bondowoso melakukan sinkronisasi DTKS dengan data penerima program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara manual tahun lalu, ditemukan 24.000 kesalahan data, mulai dari data ganda, penerima manfaat yang telah pindah atau meninggal, serta kesalahan NIK. Pembersihan data ini ikut menghemat anggaran daerah sebesar Rp7,6 miliar.

Pandemi sekarang menjadi ujian bagi kesiapan manajemen data dan kapasitas birokrasi. Di masa depan, DTKS harus menjadi basis data terdepan untuk bantuan sosial, dengan satu daftar untuk setiap individu atau keluarga yang berhak menerima bantuan pemerintah pusat dan daerah.

Meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan terkait dengan pengembangan dan penerapan kebijakan data tunggal untuk Indonesia, COVID-19 memberikan peluang untuk mempercepat pekerjaan ini dan meningkatkan kolaborasi antar lembaga dan sektor.

Artikel lengkap diterbitkan di [The Jakarta Post](#)

03 SISTEM DATA

Realokasi Anggaran Untuk Menghadapi COVID-19: Cerita dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

Pemerintah Kabupaten Sumbawa secara proaktif telah mendukung desa-desa untuk membentuk Gugus Tugas COVID-19 Desa dan merealokasi anggaran mereka guna memperkuat program-program bantuan sosial, melakukan sosialisasi kesehatan kepada masyarakat, dan pembelian perlengkapan untuk pencegahan penyebaran virus Corona.

"Mengubah APB Desa dengan cepat menjadi tugas berat bagi desa," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Varian Bintoro. "KOMPAK banyak membantu kami menerjemahkan kebijakan nasional menjadi langkah-langkah teknis yang akan digunakan oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan saat mengawasi desa-desa dalam merealokasi dan *re-focusing* anggaran mereka."

Pada Juni 2020, seluruh 157 desa di Kabupaten Sumbawa telah merealokasi Rp39,8 miliar dari APB Desa mereka untuk merespon COVID-19

04 STUDI KASUS



Lebih dari 90 persen (Rp37 miliar) realokasi anggaran tersebut digunakan untuk memperluas program BLT-Dana Desa untuk lebih dari 20.000 rumah tangga miskin dan rentan. Sementara sisanya, digunakan untuk pembelian perlengkapan protokol kesehatan, sosialisasi, penyemprotan disinfektan, serta pemberian bantuan bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di desa.

Cerita selengkapnya, tersedia di [sini](#)

05 SURVEI



Pemerintah desa perlu dipersiapkan agar mampu menjalankan kegiatan-kegiatan tanggap COVID-19 dengan baik. KOMPAK memberikan dukungan untuk memastikan mereka memiliki sistem dan sumber daya agar dapat mengoordinasikan dan memberikan layanan secara efektif kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pada bulan Juni 2020, KOMPAK melakukan survei untuk lebih memahami seberapa baik pemerintah desa telah mempersiapkan diri dan tanggap terhadap COVID-19. Survei ini dilakukan di 364 dari 416 desa wilayah kerja KOMPAK di 24 kabupaten di 7 provinsi (52 desa yang tidak disurvei berada di Papua/Papua Barat).

Temuan menunjukkan bahwa mayoritas desa telah membuat persiapan dalam menghadapi COVID-19, seperti membentuk gugus tugas dan merealokasi anggaran. Jawaban utama yang diberikan pemerintah desa adalah desa telah memperbarui data kelompok rentan dan memberikan bantuan tunai kepada warga yang membutuhkan. Survei ini juga mencatat bahwa ada tiga warga yang meninggal akibat COVID-19 di desa wilayah kerja KOMPAK.

Ringkasan

95%

desa telah memiliki Gugus Tugas COVID-19

96%

desa telah merevisi anggaran untuk merespon COVID-19

36%

desa bekerja sama dengan desa lain dalam merespon COVID-19 (seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB)

99%

desa menggunakan APB Desa untuk BLT-Dana Desa

86%

desa menyampaikan daftar penerima manfaat bantuan sosial kepada publik

34%

desa memiliki layanan administrasi kependudukan (adminduk) *online*

Temuan survei untuk setiap provinsi dan nasional tersedia di [sini](#)

06

KEGIATAN DAN PUBLIKASI



Kegiatan Bulan Juli

7 Juli: Webinar peran strategis Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam pengadaan, penyaluran kebutuhan pokok masyarakat dan penyangga ekonomi di wilayah perdesaan bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pemalang.

16-17 Juli: Lokakarya penyusunan indikator kemiskinan/kerentanan dalam rangka penanganan COVID-19 bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

23 Juli: Webinar tentang sosialisasi aplikasi Bumdesmart.id bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi.

Juli: Pelatihan virtual peningkatan kapasitas Fasilitator Adminduk Desa dalam layanan adminduk daring dan fasilitasi pendataan penduduk rentan adminduk di masa pandemi COVID-19 bersama dengan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat, Aceh dan Jawa Tengah dan PUSKAPA.

Kabupaten Bantaeng kembangkan indikator kemiskinan dan kerentanan

Pada 16-17 Juli, Pemerintah Kabupaten Bantaeng, didukung oleh KOMPAK, mengadakan lokakarya virtual untuk penyusunan indikator kemiskinan/kerentanan dalam rangka penanganan dan pemulihan COVID-19. Lokakarya dihadiri organisasi perangkat daerah dari kabupaten, delapan kecamatan, serta 21 kelurahan dan 46 desa.

Lokakarya ini menjadi bagian dari upaya penyusunan kebijakan kabupaten terkait penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang timbul sebagai dampak dari COVID-19. Lokakarya juga menghasilkan berbagai masukan yang disepakati bersama dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang diantaranya mencakup penyusunan draf surat keputusan bupati.

Salah satu hasil utama dari lokakarya ini adalah penyusunan indikator kemiskinan dan kerentanan untuk tiga klaster berbeda: masyarakat pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi. Manajer Provinsi KOMPAK Sulawesi Selatan, Ahmar Djalil mengatakan, "Berbicara indikator kemiskinan, tentu ada perbedaan pada masyarakat di wilayah dataran rendah, pesisir dan pegunungan. Inilah yang kita rumuskan." Ahmar berharap ketika indikator itu sudah diikat dengan peraturan bupati, maka hal tersebut dapat menjadi acuan bersama seluruh pihak.

Berita dari media lokal tentang lokakarya bisa diakses di [sini](#)

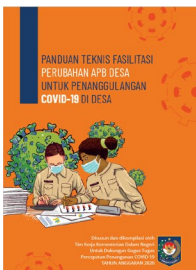
PUBLIKASI



Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

Buku Panduan Pendataan BLT-Dana Desa ini disusun dengan mengonsolidasikan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan BLT-Dana Desa untuk membantu desa memahami langkah-langkah teknis pendataan calon penerima bantuan sesuai peraturan yang berlaku.

Dipublikasikan pada: Juli 2020



Panduan Teknis Fasilitasi Perubahan APB Desa Untuk Penanggulangan COVID-19 di Desa

Panduan ini merupakan salah satu rujukan, sekaligus merupakan alat bantu bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, terutama bagi aparatur kecamatan sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) dalam proses perubahan APB Desa dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Dipublikasikan: Juli 2020

Semua dokumen publikasi terkait COVID-19 tersedia di:
<https://www.kompak.or.id/id/covid-19/default>